

Analisis tata kelola institusi pendidikan tinggi dalam perubahan peraturan terkait perguruan tinggi (PP 152/2000, PP 66/2010 dan UU 12/2012), studi kasus: Universitas Indonesia = Analysis of higher education institution governance in higher education regulation change (PP. 152/2000, PP. 66 2010 and UU 12/2012), case study: University of Indonesia

Edo Yuliandra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20347085&lokasi=lokal>

Abstrak

Universitas Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan yang menjadi landasan pengelolaannya, mulai dari PP 152/2000, PP 66/2010, dan UU 12/2012 yang baru saja disahkan. Perubahan peraturan tersebut merubah bagaimana tatanan dan praktik pengelolaan Universitas Indonesia. Perubahan yang terjadi terlihat pada hubungan universitas dengan stakeholdernya. Selain itu, perubahan tersebut mengakibatkan organ universitas seperti MWA dan SAU menjadi organ yang ada namun tidak diakui dalam Peraturan Pemerintah di masa transisi. Perubahan ini juga menyebabkan terganggunya operasional Universitas Indonesia karena ketiadaan rektor.

Setelah dilakukan wawancara dan tinjauan terhadap peraturan yang berlaku, penelitian ini menyimpulkan bahwa Universitas Indonesia saat ini menerapkan pola PTP yang mana terdapat MWA dan SU sementara yang dibentuk oleh rektor sebelum Universitas Indonesia sebagai PTN BH resmi disahkan. Artinya, pola seperti BHMN dengan dua pengawas operasional yaitu MWA dan SU masih tetap ada. Organ pengawas MWA dan SAU terpisah dengan eksekutif universitas sehingga dapat disimpulkan bahwa Universitas Indonesia menerapkan dual system structure dalam tata kelolanya.

.....

There was some changes of regulation of higher education in University of Indonesia, since, PP 152/2000, PP 66/2010, dan UU 12/2012. These changes create the structure and governance practice in Universitas Indonesia. It can be seen in it's relationship with stakeholders. This changes make MWA and SAU become unauthorized entity in Peraturan Pemerintah while Universitas Indonesia is still in transition phase. Moreover, it disturbs university's operation because of the absence of rector.

After some interviews was held and regulation was evaluated, this research conclude that right now, Universitas Indonesia was governed as PTP where MWA and SU created by rector are still exist. It means that BHMN structure is still applied in Universitas Indonesia. MWA and SAU are separated with board of executive of Universitas Indonesia which means that Universitas Indonesia is applying dual system structure in it's governance.